DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta
- Agustin, M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). Publika, 4(1).
- Ambarsari, I. A., & Mardliyah, S. (2019). Revitalisasi Karang Taruna Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tretes Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. J+ Plus: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah, 8(2), 1-10.
- Basri, S. Y. Z., & Subri, M. (2006). Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Publik. PT Raja Grafindo Persada.
- Harun, R., & Ardianto, E. (2011). Komunikasi pembangunan & perubahan sosial: perspektif dominan, kaji ulang, dan teori kritis. Rajawali Pers.
- KENO, D. C., LENGKONG, F. D., & POMBENGI, J. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Ibu Selatan. Jurnal Administrasi Publik, 4(48).
- Listina, V., Kustiawan, K., & Pratama, R. A. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DESA DI DESA RESUN PESISIR KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Magriasti, L. (2011). Arti penting partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah: analisis dengan teori Sistem David Easton.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Governance, 5(1).
- Moloeng, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi Bandung. PT Rosda Karya.
- Nasution, S. H. (2017). Analisis Partisipasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa di Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Nurahma, G. A., & Hendriani, W. (2021). Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif. Mediapsi, 7(2), 119-129.
- Pinilas, R., Gosal, R., & Kasenda, V. (2017). Partisipasi Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud). Jurnal Eksekutif, 2(2).
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Blora. Jurnal Analisa Sosiologi, 5(2), 40-52.

- Sagala, J., Badaruddin, B., & Purwoko, A. (2022). Peran Pemuda dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaaan. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(7), 6993-7002.
- Safira, E. (2022). Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Kelurahan Kota Medan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL], 2(3).
- Sajidin, M., Hafid, A., & AR, M. Y. (2023). Pendampingan Tim Penyusun RKP Desa dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Desa Pamboborang. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 8(4), 1102-1109.
- Sutrisna, I. W. (2022). Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Peran Karang Taruna. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 5(2), 16-24.
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif untuk riset akuntansi budaya. Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2(1), 44-50.
- Taufiqurokhman, D. R., Sos, S., & Si, M. (2008). Konsep dan kajian ilmu perencanaan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(2), 18-32.
- Peraturan Desa Kwajon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kwajon tahun 2021
- https://www.kompasiana.com/poppyfernanda7867/62d1585a6e7f014798785a03/keterlibatan-generasi-muda-dalam-kebijakan-publik.
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan (UU Kemudaan)
- Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa